NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Tahun 2025

Laporan Capaian Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman : http://www.jatengprov.go.id Pos-el : disperakim@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Profil Dinas	3
Landasan Hukum	5
Struktur Organisasi	6
Penanganan Backlog Perumahan	7
Penyediaan Rumah Subsidi	24
Penanganan Kawasan Permukiman	36
Program Pertanahan	46
Penghargaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	56
Penutup	57



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

PROFIL DINAS



TUGAS POKOK

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

MAKSUD

Penyusunan Buku Rilis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Akhir Tahun Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan data-data ampuan DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perhitungan capaian kinerja dinas tahun berjalan dan dasar perencanaan tahun berikutnya.

TUJUAN

Tujuan Penyusunan Buku Rilis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Akhir Tahun Tahun 2025 adalah memberikan informasi terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi ampuan DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh pihak yang memerlukan baik dari unsur pemerintahan, swasta ataupun masyarakat umum.



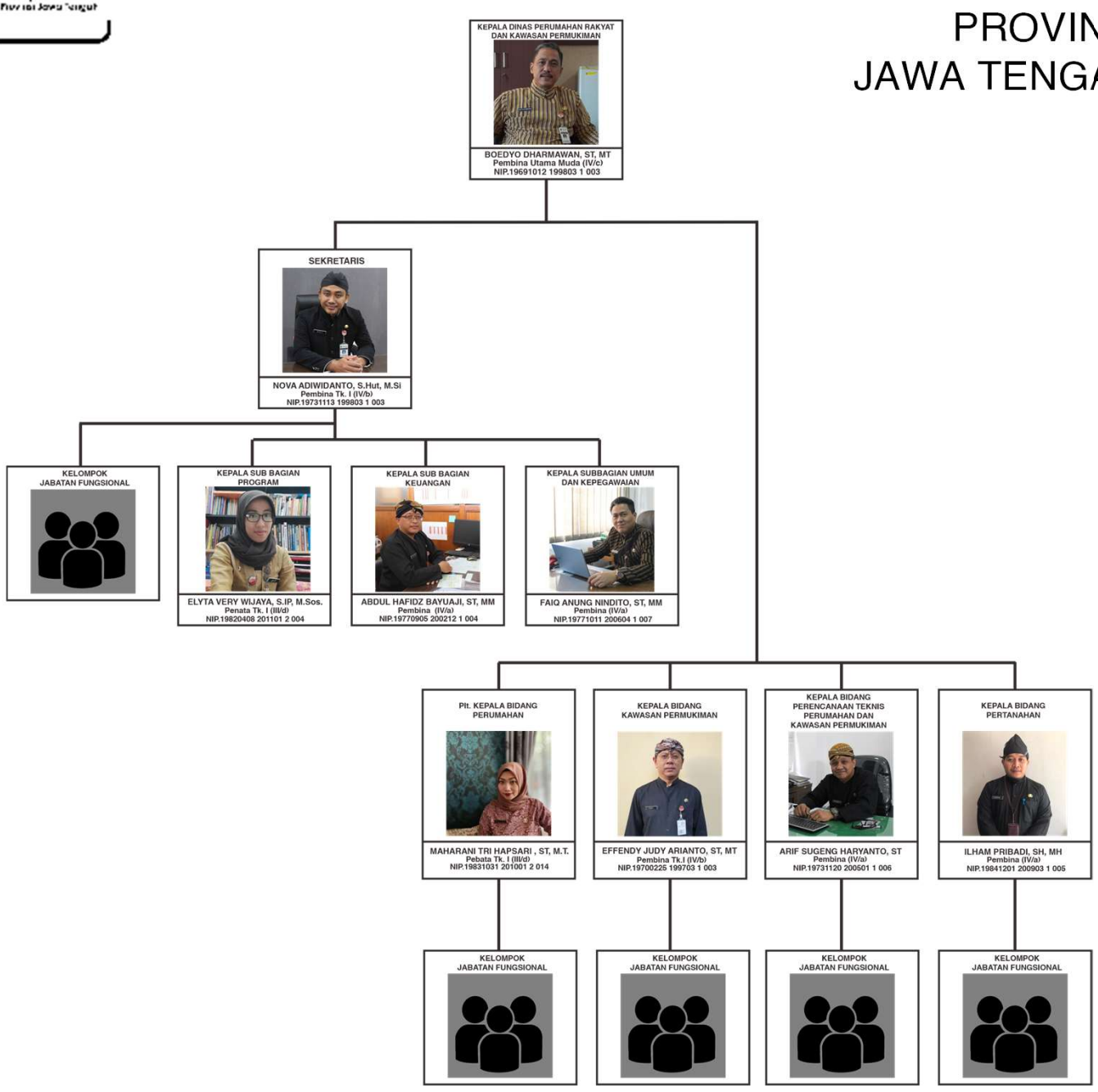
AO1

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 46).

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH



01









Penanganan

BACKLOG PERUMAHAN



***Backlog* Perumahan** adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia (terbangun) dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah atau kawasan tertentu.

BACKLOG PERUMAHAN 1.332.968 unit

1

BACKLOG KEPEMILIKAN 310.855 unit

adalah selisih antara jumlah rumah tangga yang telah memiliki rumah dengan jumlah seluruh rumah tangga yang membutuhkan rumah untuk dimiliki.

2

BACKLOG KELAYAKAN/ PENINGKATAN 1.022.113 unit

adalah jumlah rumah yang dimiliki dan dihuni tetapi kondisinya tidak layak secara teknis baik karena kerusakan fisik, tidak memenuhi standar kesehatan, atau tidak aman untuk ditinggali.

SEBARAN
BACKLOG PERUMAHAN
TAHUN 2025



Data Awal

- Total **Backlog Perumahan** sebanyak **1.332.968 unit**.
- Backlog Perumahan paling **banyak di Kabupaten Grobogan** yakni **114.934 Unit** dan paling **sedikit** di **Kota Salatiga** yakni **2.931** Unit.

NO	NAMA KAB/KOTA	BACKLOG PERUMAHAN		TOTAL BACKLOG PERUMAHAN
		BACKLOG KEPEMILIKAN	BACKLOG KELAYAKAN	
1	Kab. Cilacap	12.318	71.148	83.466
2	Kab. Banyumas	11.228	50.569	61.797
3	Kab. Purbalingga	6.072	27.881	33.953
4	Kab. Banjarnegara	5.294	32.348	37.642
5	Kab. Kebumen	11.937	24.353	36.290
6	Kab. Purworejo	11.990	15.642	27.632
7	Kab. Wonosobo	4.831	17.869	22.700
8	Kab. Magelang	7.867	30.444	38.311
9	Kab. Boyolali	6.526	36.649	43.175
10	Kab. Klaten	21.370	18.961	40.331
11	Kab. Sukoharjo	2.431	10.273	12.704
12	Kab. Wonogiri	2.529	16.005	18.534
13	Kab. Karanganyar	5.651	11.467	17.118
14	Kab. Sragen	5.603	33.180	38.783
15	Kab. Grobogan	8.493	106.441	114.934
16	Kab. Blora	4.539	80.275	84.814
17	Kab. Rembang	3.753	36.873	40.626
18	Kab. Pati	9.181	55.224	64.405
19	Kab. Kudus	3.192	2.065	5.257
20	Kab. Jepara	10.264	31.975	42.239
21	Kab. Demak	8.486	50.085	58.571
22	Kab. Semarang	4.380	20.377	24.757
23	Kab. Temanggung	4.934	22.603	27.537
24	Kab. Kendal	9.785	33.801	43.586
25	Kab. Batang	4.335	28.177	32.512
26	Kab. Pekalongan	10.069	15.635	25.704
27	Kab. Pemalang	12.673	37.407	50.080
28	Kab. Tegal	21.926	26.907	48.833
29	Kab. Brebes	22.333	53.127	75.460
30	Kota Magelang	3.332	809	4.141
31	Kota Surakarta	16.857	4.292	21.149
32	Kota Salatiga	1.893	1.038	2.931
33	Kota Semarang	20.896	13.523	34.419
34	Kota Pekalongan	7.044	4.168	11.212
35	Kota Tegal	6.843	522	7.365
	TOTAL	**310.855**	**1.022.113**	**1.332.968**

PENANGANAN
BACKLOG PERUMAHAN DI JAWA TENGAH



Pada tahun 2025 dilaksanakan penanganan pemenuhan *Backlog* Perumahan melalui berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, CSR, Baznas, partisipasi masyarakat dan sumber pendanaan lainnya. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak **274.514 unit**, dengan rincian sebagai berikut :

- APBN dengan target sebanyak **7.534 unit** terealisasi sebanyak **14.454 unit** yang berasal dari BSPS, Kementerian/ Lembaga dan Dana Desa;
- APBD Provinsi Jawa Tengah target sebanyak **17.510 unit** dengan realisasi sebanyak **17.510 unit,** yang terdiri dari **pembangunan baru** sebanyak **340 unit** dan **peningkatan kualitas/ renovasi rumah** sebanyak **17.170 Unit**;
- APBD Kabupaten/Kota target sebanyak **6.776 unit** dengan realisasi sebanyak **12.830 unit;**
- CSR dan Baznas target sebanyak **2.070 unit** dengan realisasi sebanyak **4.012 unit;**
- Realisasi dari sumber pendanaan lainnya yakni **:**
  a. Partisipasi masyarakat sebanyak **219.524 unit,**
  b. Validasi/ *Updating* data sebanyak **6.184 Unit.**

Sampai dengan Akhir Tahun 2025 sisa *Backlog* Perumahan di Provinsi Jawa Tengah yang masih memerlukan penanganan sebanyak **1.058.454 unit**.

REALISASI PENANGANAN
BACKLOG PERUMAHAN
TAHUN 2025



No.	Kabupaten	Awal	PENANGANAN PERUMAHAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2025										
			APBN				APBD		CSR & Baznas	Swadaya	Validasi/ Updating	Total	Sisa Backlog Perumahan Akhir Tahun 2025
			Kementerian /Lembaga	BSPS	DAK	Dana Desa	Provinsi	Kab/Kota					
1	CILACAP	83.466	294	563	-	21	835	356	247	9.684	62	12.062	71.404
2	BANYUMAS	61.797	257	851	-	349	870	1.358	720	25.334	2.445	32.184	29.613
3	PURBALINGGA	33.953	84	120	-	66	579	201	267	5.921	154	7.392	26.561
4	BANJARNEGARA	37.642	117	80	-	9	304	172	73	7.544	10	8.309	29.333
5	KEBUMEN	36.290	169	190	-	9	347	360	96	6.349	17	7.537	28.753
6	PURWOREJO	27.632	256	42	-	23	351	214	30	3.853	4	4.773	22.859
7	WONOSOBO	22.700	283	153	-	183	739	242	56	8.363	412	10.431	12.269
8	MAGELANG	38.311	1.002	105	-	171	997	501	41	6.249	17	9.083	29.228
9	BOYOLALI	43.175	92	187	-	59	430	1.036	147	4.328	29	6.308	36.867
10	KLATEN	40.331	122	255	-	28	310	460	42	4.220	30	5.467	34.864
11	SUKOHARJO	12.704	34	296	-	-	513	325	181	2.299	9	3.657	9.047
12	WONOGIRI	18.534	324	67	-	64	827	448	125	2.270	86	4.211	14.323
13	KARANGANYAR	17.118	12	59	-	13	357	46	6	2.419	21	2.933	14.185
14	SRAGEN	38.783	65	814	-	176	350	167	480	3.470	19	5.541	33.242
15	GROBOGAN	114.934	70	303	41	53	354	644	77	18.953	33	20.528	94.406
16	BLORA	84.814	108	264	-	13	651	140	88	26.765	964	28.993	55.821
17	REMBANG	40.626	51	561	-	18	727	64	12	5.090	65	6.588	34.038
18	PATI	64.405	107	600	-	3	995	80	107	8.941	70	10.903	53.502
19	KUDUS	5.257	23	-	-	2	254	36	358	512	2	1.187	4.070
20	JEPARA	42.239	62	104	-	28	739	468	118	6.264	109	7.892	34.347
21	DEMAK	58.571	208	96	-	18	980	736	121	11.925	204	14.288	44.283
22	SEMARANG	24.757	214	348	1	24	373	810	11	4.383	40	6.204	18.553
23	TEMANGGUNG	27.537	224	407	-	12	584	219	43	5.653	116	7.258	20.279
24	KENDAL	43.586	46	150	54	2	581	185	24	4.199	13	5.254	38.332
25	BATANG	32.512	104	-	-	28	1.026	464	60	8.188	381	10.251	22.261
26	PEKALONGAN	25.704	76	-	-	18	553	122	21	3.813	85	4.688	21.016
27	PEMALANG	50.080	228	-	-	1	469	91	53	9.053	45	9.940	40.140
28	TEGAL	48.833	13	-	-	25	367	412	17	2.614	18	3.466	45.367
29	BREBES	75.460	137	20	-	35	998	285	57	6.752	107	8.391	67.069
30	KOTA MAGELANG	4.141	10	-	-	-	-	227	52	243	30	562	3.579
31	KOTA SURAKARTA	21.149	126	91	-	-	2	401	105	374	131	1.230	19.919
32	KOTA SALATIGA	2.931	19	106	-	-	4	146	65	603	87	1.030	1.901
33	KOTA SEMARANG	34.419	79	700	-	2	5	635	44	1.274	182	2.921	31.498
34	KOTA PEKALONGAN	11.212	355	-	-	-	13	510	16	503	40	1.437	9.775
35	KOTA TEGAL	7.365	2	-	-	-	26	269	52	1.119	147	1.615	5.750
TOTAL		**1.332.968**	**5.373**	**7.532**	**96**	**1.453**	**17.510**	**12.830**	**4.012**	**219.524**	**6.184**	**274.514**	**1.058.454**

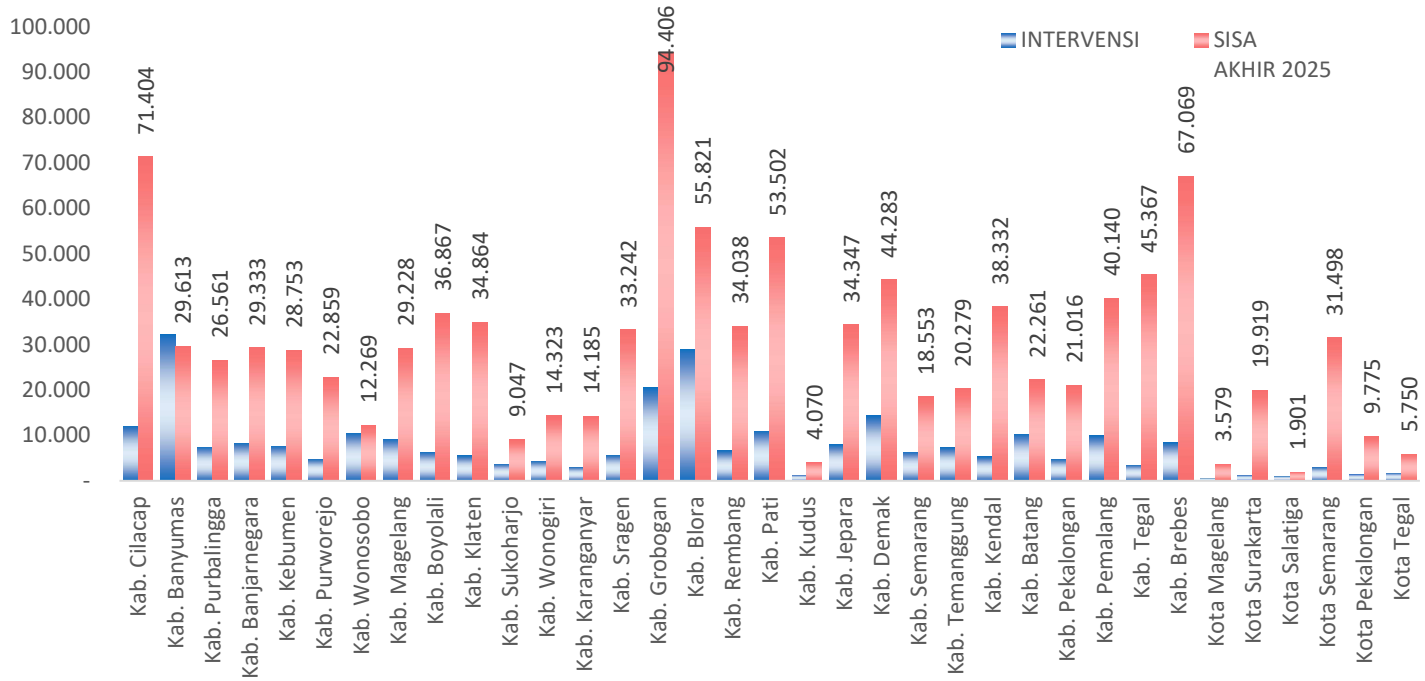
RINCIAN REALISASI PENANGANAN

BACKLOG PERUMAHAN

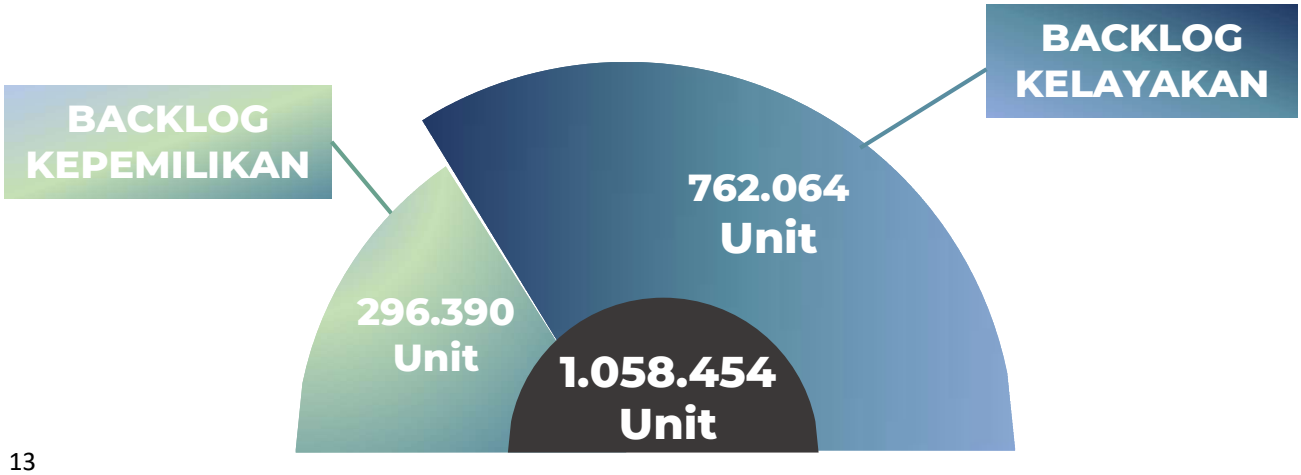
TAHUN 2025

No	Kabupaten	Penanganan Perumahan Sampai Akhir Tahun 2025																	
		Awal		APBN		APBD Provinsi		APBD Kab/Kota		CSR & Baznas		Swadaya		Validasi/Updating		Total		Sisa Backlog Perumahan Akhir Tahun 2025	
		Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan	Backlog Kelayakan	Backlog Kepemilikan
1	CILACAP	71.148	12.318	878	-	835	-	345	11	206	41	9.684	-	62	-	12.010	52	59.138	12.266
2	BANYUMAS	50.569	11.228	1.405	52	831	39	1.237	121	676	44	21.569	3.765	1.890	555	27.608	4.576	22.961	6.652
3	PURBALINGGA	27.881	6.072	270	-	579	-	201	-	267	-	5.919	2	154	-	7.390	2	20.491	6.070
4	BANJARNEGARA	32.348	5.294	206	-	251	53	172	-	73	-	7.542	2	10	-	8.254	55	24.094	5.239
5	KEBUMEN	24.353	11.937	368	-	347	-	351	9	95	1	6.348	1	17	-	7.526	11	16.827	11.926
6	PURWOREJO	15.642	11.990	321	-	345	6	214	-	30	-	3.852	1	4	-	4.766	7	10.876	11.983
7	WONOSOBO	17.869	4.831	511	108	739	-	121	121	52	4	5.443	2.920	20	392	6.886	3.545	10.983	1.286
8	MAGELANG	30.444	7.867	1.272	6	997	-	500	1	41	-	6.173	76	13	4	8.996	87	21.448	7.780
9	BOYOLALI	36.649	6.526	338	-	394	36	1.006	30	147	-	4.326	2	29	-	6.240	68	30.409	6.458
10	KLATEN	18.961	21.370	405	-	310	-	460	-	42	-	4.218	2	30	-	5.465	2	13.496	21.368
11	SUKOHARJO	10.273	2.431	330	-	473	40	325	-	180	1	2.258	41	9	-	3.575	82	6.698	2.349
12	WONOGIRI	16.005	2.529	455	-	781	46	448	-	125	-	2.269	1	86	-	4.164	47	11.841	2.482
13	KARANGANYAR	11.467	5.651	84	-	357	-	44	2	6	-	2.418	1	21	-	2.930	3	8.537	5.648
14	SRAGEN	33.180	5.603	1.055	-	350	-	167	-	480	-	3.470	-	19	-	5.541	-	27.639	5.603
15	GROBOGAN	106.441	8.493	467	-	354	-	644	-	77	-	18.952	1	33	-	20.527	1	85.914	8.492
16	BLORA	80.275	4.539	385	-	646	5	127	13	88	-	26.765	-	964	-	28.975	18	51.300	4.521
17	REMBANG	36.873	3.753	630	-	727	-	64	-	12	-	5.090	-	65	-	6.588	-	30.285	3.753
18	PATI	55.224	9.181	710	-	995	-	80	-	107	-	8.941	-	70	-	10.903	-	44.321	9.181
19	KUDUS	2.065	3.192	25	-	254	-	36	-	356	2	512	-	2	-	1.185	2	880	3.190
20	JEPARA	31.975	10.264	194	-	734	5	468	-	118	-	6.264	-	109	-	7.887	5	24.088	10.259
21	DEMAK	50.085	8.486	322	-	980	-	697	39	121	-	11.925	-	204	-	14.249	39	35.836	8.447
22	SEMARANG	20.377	4.380	586	1	371	2	810	-	11	-	4.380	3	40	-	6.198	6	14.179	4.374
23	TEMANGGUNG	22.603	4.934	538	105	584	-	158	61	37	6	4.568	1.085	8	108	5.893	1.365	16.710	3.569
24	KENDAL	33.801	9.785	250	2	542	39	169	16	24	-	4.199	-	13	-	5.197	57	28.604	9.728
25	BATANG	28.177	4.335	114	18	999	27	424	40	59	1	7.251	937	245	136	9.092	1.159	19.085	3.176
26	PEKALONGAN	15.635	10.069	94	-	553	-	115	7	20	1	3.812	1	85	-	4.679	9	10.956	10.060
27	PEMALANG	37.407	12.673	229	-	469	-	91	-	53	-	9.053	-	45	-	9.940	-	27.467	12.673
28	TEGAL	26.907	21.926	38	-	367	-	412	-	17	-	2.596	18	18	-	3.448	18	23.459	21.908
29	BREBES	53.127	22.333	192	-	998	-	270	15	57	-	6.751	1	107	-	8.375	16	44.752	22.317
30	KOTA MAGELANG	809	3.332	-	10	-	-	204	23	50	2	133	110	-	30	387	175	422	3.157
31	KOTA SURAKARTA	4.292	16.857	217	-	-	2	395	6	54	51	74	300	-	131	740	490	3.552	16.367
32	KOTA SALATIGA	1.038	1.893	125	-	-	4	138	8	64	1	145	458	2	85	474	556	564	1.337
33	KOTA SEMARANG	13.523	20.896	781	-	-	5	616	19	44	-	1.273	1	182	-	2.896	25	10.627	20.871
34	KOTA PEKALONGAN	4.168	7.044	9	346	8	5	504	6	16	-	152	351	-	40	689	748	3.479	6.296
35	KOTA TEGAL	522	6.843	2	-	-	26	256	13	50	2	66	1.053	2	145	376	1.239	146	5.604
TOTAL		**1.022.113**	**310.855**	**13.806**	**648**	**17.170**	**340**	**12.269**	**561**	**3.855**	**157**	**208.391**	**11.133**	**4.558**	**1.626**	**260.049**	**14.465**	**762.064**	**296.390**

SEBARAN REALISASI
BACKLOG PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA



SISA BACKLOG
PERUMAHAN 2025



SEBARAN ALOKASI DAN REALISASI

SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI

NO	NAMA KAB/KOTA	TOTAL KUOTA			TOTAL REALISASI		
		KELAYAKAN	KEPEMILIKAN	TOTAL	KELAYAKAN	KEPEMILIKAN	TOTAL
1	Kab. Cilacap	835	0	835	835	-	835
2	Kab. Banyumas	831	39	870	831	39	870
3	Kab. Purbalingga	579	0	579	579	-	579
4	Kab. Banjarnegara	251	53	304	251	53	304
5	Kab. Kebumen	347	0	347	347	-	347
6	Kab. Purworejo	345	6	351	345	6	351
7	Kab. Wonosobo	739	0	739	739	-	739
8	Kab. Magelang	997	0	997	997	-	997
9	Kab. Boyolali	394	36	430	394	36	430
10	Kab. Klaten	310	0	310	310	-	310
11	Kab. Sukoharjo	473	40	513	473	40	513
12	Kab. Wonogiri	781	46	827	781	46	827
13	Kab. Karanganyar	357	0	357	357	-	357
14	Kab. Sragen	350	0	350	350	-	350
15	Kab. Grobogan	354	0	354	354	-	354
16	Kab. Blora	646	5	651	646	5	651
17	Kab. Rembang	727	0	727	727	-	727
18	Kab. Pati	995	0	995	995	-	995
19	Kab. Kudus	254	0	254	254	-	254
20	Kab. Jepara	734	5	739	734	5	739
21	Kab. Demak	980	0	980	980	-	980
22	Kab. Semarang	371	2	373	371	2	373
23	Kab. Temanggung	584	0	584	584	-	584
24	Kab. Kendal	542	39	581	542	39	581
25	Kab. Batang	999	27	1.026	999	27	1.026
26	Kab. Pekalongan	553	0	553	553	-	553
27	Kab. Pemalang	469	0	469	469	-	469
28	Kab. Tegal	367	0	367	367	-	367
29	Kab. Brebes	998	0	998	998	-	998
30	Kota Magelang	-	0	0	-	-	0
31	Kota Surakarta	-	2	2	-	2	2
32	Kota Salatiga	-	4	4	-	4	4
33	Kota Semarang	-	5	5	-	5	5
34	Kota Pekalongan	8	5	13	8	5	13
35	Kota Tegal	-	26	26	-	26	26
TOTAL		**17.170**	**340**	**17.510**	**17.170**	**340**	**17.510**

Pada Tahun 2025 alokasi penanganan *Backlog* Perumahan di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran APBD Provinsi sebanyak **17.510 Unit** yang terdiri dari ***Backlog* Kepemilikan** sebanyak **340 Unit** dan ***Backlog* Kelayakan** sebanyak **17.170 Unit**.

Sampai dengan Akhir Tahun 2025 **penanganan *Backlog* Perumahan** yang sudah terealisasi sebanyak **17.510 Unit** terdiri dari **Backlog Kepemilikan 340 unit** dan **Backlog Kelayakan 17.170 unit**.

SEBARAN ALOKASI DAN REALISASI

SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI

PROGRAM PENANGANAN PERUMAHAN

NO	KABUPATEN	TOTAL KUOTA								TOTAL REALISASI							
		KELAYAKAN			TOTAL KELAYAKAN	KEPEMILIKAN		TOTAL KEPEMILIKAN	TOTAL KUOTA	KELAYAKAN			TOTAL KELAYAKAN	KEPEMILIKAN		TOTAL KEPEMILIKAN	TOTAL REALISASI
		PK RTLH	PK BENCANA	PB BENCANA		PB BACKLOG	PB RELOKASI			PK RTLH	PK BENCANA	PB BENCANA		PB BACKLOG	PB RELOKASI		
1	Cilacap	835	0	0	835	0	0	0	835	835	0	0	835	0	0	0	835
2	Banyumas	831	0	0	831	37	2	39	870	831	0	0	831	37	2	39	870
3	Purbalingga	579	0	0	579	0	0	0	579	579	0	0	579	0	0	0	579
4	Banjarnegara	251	0	0	251	0	53	53	304	251	0	0	251	0	53	53	304
5	Kebumen	347	0	0	347	0	0	0	347	347	0	0	347	0	0	0	347
6	Purworejo	345	0	0	345	0	6	6	351	345	0	0	345	0	6	6	351
7	Wonosobo	729	10	0	739	0	0	0	739	729	10	0	739	0	0	0	739
8	Magelang	997	0	0	997	0	0	0	997	997	0	0	997	0	0	0	997
9	Boyolali	394	0	0	394	36	0	36	430	394	0	0	394	36	0	36	430
10	Klaten	310	0	0	310	0	0	0	310	310	0	0	310	0	0	0	310
11	Sukoharjo	473	0	0	473	37	3	40	513	473	0	0	473	37	3	40	513
12	Wonogiri	781	0	0	781	46	0	46	827	781	0	0	781	46	0	46	827
13	Karanganyar	357	0	0	357	0	0	0	357	357	0	0	357	0	0	0	357
14	Sragen	350	0	0	350	0	0	0	350	350	0	0	350	0	0	0	350
15	Grobogan	339	15	0	354	0	0	0	354	339	15	0	354	0	0	0	354
16	Blora	646	0	0	646	0	5	5	651	646	0	0	646	0	5	5	651
17	Rembang	727	0	0	727	0	0	0	727	727	0	0	727	0	0	0	727
18	Pati	995	0	0	995	0	0	0	995	995	0	0	995	0	0	0	995
19	Kudus	254	0	0	254	0	0	0	254	254	0	0	254	0	0	0	254
20	Jepara	734	0	0	734	0	5	5	739	734	0	0	734	0	5	5	739
21	Demak	860	105	15	980	0	0	0	980	860	105	15	980	0	0	0	980
22	Semarang	371	0	0	371	2	0	2	373	371	0	0	371	2	0	2	373
23	Temanggung	584	0	0	584	0	0	0	584	584	0	0	584	0	0	0	584
24	Kendal	535	5	2	542	36	3	39	581	535	5	2	542	36	3	39	581
25	Batang	999	0	0	999	24	3	27	1.026	999	0	0	999	24	3	27	1.026
26	Pekalongan	553	0	0	553	0	0	0	553	553	0	0	553	0	0	0	553
27	Pemalang	459	10	0	469	0	0	0	469	459	10	0	469	0	0	0	469
28	Tegal	367	0	0	367	0	0	0	367	367	0	0	367	0	0	0	367
29	Brebes	998	0	0	998	0	0	0	998	998	0	0	998	0	0	0	998
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	4	4	4
33	Kota Semarang	0	0	0	0	3	2	5	5	0	0	0	0	3	2	5	5
34	Kota Pekalongan	0	5	3	8	2	3	5	13	0	5	3	8	2	3	5	13
35	Kota Tegal	0	0	0	0	17	9	26	26	0	0	0	0	17	9	26	26
	TOTAL	17.000	150	20	17.170	240	100	340	17.510	17.000	150	20	17.170	240	100	340	17.510

SEBARAN REALISASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

NO	KABUPATEN	BAZNAS KAB	BAZNAS PROV	BANK JATENG	BUDDHA TZU CHI	DJARUM	BANK JATENG PROV	ASTRA INTERNATIONAL	HIT	MATRA	PT. SMF
1	Cilacap	192	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Banyumas	69	20	9	268	-	23	142	-	-	-
3	Purbalingga	51	17	146	-	10	-	-	-	-	-
4	Banjarnegara	18	12	-	-	15	-	-	-	-	-
5	Kebumen	42	20	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Purworejo	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Wonosobo	6	17	6	-	-	-	-	-	-	-
8	Magelang	5	7	6	-	-	1	-	-	-	-
9	Boyolali	116	33	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Klaten	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sukoharjo	49	29	66	-	-	30	-	-	-	-
12	Wonogiri	-	29	13	-	-	48	-	-	-	-
13	Karanganyar	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sragen	286	46	-	-	-	-	-	-	100	-
15	Grobogan	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Blora	51	11	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Rembang	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
18	Pati	79	10	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kudus	20	4	-	-	211	-	-	112	-	-
20	Jepara	95	27	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Demak	2	36	-	-	10	6	-	-	-	-
22	Semarang	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Temanggung	9	4	-	-	17	-	-	-	-	-
24	Kendal	-	10	-	-	-	14	-	-	-	-
25	Batang	-	18	1	-	-	26	-	-	-	-
26	Pekalongan	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pemalang	-	22	20	-	-	-	-	-	-	-
28	Tegal	1	11	5	-	-	-	-	-	-	-
29	Brebes	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Magelang	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Surakarta	-	2	-	-	-	-	-	-	-	37
32	Kota Salatiga	7	-	49	-	-	-	-	-	-	-
33	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kota Pekalongan	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-
35	Kota Tegal	-	-	4	-	-	50	-	-	-	-
TOTAL		**1.187**	**485**	**341**	**268**	**263**	**198**	**142**	**112**	**100**	**37**

Penanganan Backlog Perumahan Provinsi Jawa Tengah terus diperkuat melalui keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam skema ***Corporate Social Responsibility*** **(CSR)**. Hingga saat ini, tercatat sebanyak **4.012 unit**.

SEBARAN REALISASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sebaran kontribusi CSR tertinggi di **Kabupaten Banyumas** dengan jumlah penyumbang CSR terbanyak, yakni **638 unit.**

Buddha Tzu Chi sebagai penyumbang terbesar di Kabupaten Banyumas dengan jumlah bantuan mencapai **268** unit.

NO	KABUPATEN	PMI KAB	PT PUNGKOOK INDONESIA	BAZNAS RI	FUD	Perorangan	LAZISMU	RSJ Soedjarwadi Klaten	NOJORONO	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	50	247
2	Banyumas	1	-	-	-	-	-	-	-	106	638
3	Purbalingga	-	-	5	-	-	-	-	-	38	267
4	Banjarnegara	-	-	-	-	-	-	-	-	28	73
5	Kebumen	-	-	-	-	-	-	-	-	34	96
6	Purworejo	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
7	Wonosobo	-	-	-	-	-	-	-	-	27	56
8	Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	22	41
9	Boyolali	22	-	-	-	-	-	-	-	-	171
10	Klaten	-	-	-	-	-	-	11	-	-	55
11	Sukoharjo	-	-	-	-	13	-	-	-	23	210
12	Wonogiri	7	-	5	-	-	-	-	-	23	125
13	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14	Sragen	-	-	5	17	-	11	-	-	15	480
15	Grobogan	-	30	-	-	-	-	-	-	43	77
16	Blora	-	-	-	-	-	-	-	-	26	88
17	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12
18	Pati	-	-	-	-	-	-	-	-	18	107
19	Kudus	-	-	-	-	-	-	-	10	1	358
20	Jepara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	124
21	Demak	-	-	-	-	-	-	-	-	67	121
22	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11
23	Temanggung	-	-	-	-	-	-	-	-	13	43
24	Kendal	-	-	5	-	-	-	-	-	3	32
25	Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	15	60
26	Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
27	Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	11	53
28	Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
29	Brebes	-	-	-	-	-	-	-	-	34	57
30	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	52
31	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	66	105
32	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	9	65
33	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
35	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
TOTAL		**30**	**30**	**20**	**17**	**13**	**11**	**11**	**10**	**737**	**4012**

Lain-lain :
Korpri, PT. Putra Bhina Karya, PT. SMI, Asosiasi Jasa Konstruksi, Bumdesma, DPD REI Komisariat Banyumas Raya, Koperasi RSUD Dr.Soehadi, PT. Global Media Data Prima, PT. IIF, PT. Karabha, RSUD Banyumas, Shiddiqiyyah, Tabebuya Hotel, Athiyah Salsabila Azizah, Bank Indonesia, Bank Syariah Sragen, BPR BKK, Himperra, Lazismu Dan Matra, Perumahan Dinar Residence, PMI Banyumas, PPUD, PT. Abhinaya Bangun Persada, PT. Alaska Baru Propertindo, PT. Edelweis Simbol Abadi, PT. Griya Mutiara Mandiri, PT. Hasamto Karya Jaya, PT. Jagad Adhi Rajasa, PT. Lunggi Tunas Abadi, PT. Ndalem Berkah Indonesia, PT. Putra Budi Karya Maju Sejahtera, PT. Sapphire Inovasi Utama, PT. Sinar Makmur Land, PT. Sumber Bumi Raya - Oma Nuryanto (Perorangan), PT. Tamara Citra Jaya Sejahtera, PT. Tiga Karya Poetra, PT. Cakrawala Pratama Manunggal, PT. Griya Bambu Kuning, PT. Putra Janur Kuning, PT. Yoga Karya Perdana, RS Margono Soekarjo.

KEMITRAAN VERVAL

BACKLOG KELAYAKAN (RTLH) MELALUI KKN

No	Perguruan Tinggi	Tanggal PKS	Nomor PKS Universitas	Nomor PKS DISPERAKIM PROV. JATENG
1	UDINUS	2 Okt 2025	221/B.23/UDN-09/IX/2025	000.4.7.2/4503
2	UNNES	23 Okt 2024	B/7929/un37.3.1/hk.07.00/2024	027/4625
3	STAI AL-ANWAR SARANG REMBANG	2 Okt 2025	Sti.Awr/P3M/01.83/X/2025	000.4.7.2/4497
4	UNSOED	4 Sep 2025	T/879/UN23.18/HK.06.00/2024	027/4014
5	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO	2 Okt 2025	078/LPPM/UMPWR/PKS/X/2025	000.4.7.2/4493
6	UNWAHAS	2 Okt 2025	007/PKS/LPPM/UWH/X/2025	000.4.7.2/4494
7	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	2 Okt 2025	553/LPPM.UMK/C.06.17/IX/2025	000.4.7.2/4495
8	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	2 Okt 2025	C7.III/117-S.Pj/LPPM/UMP/X/2025	000.4.7.2/4510
9	UNISSULA	2 Okt 2025	72/C.1/SA-LPPM/X/2025	000.4.7.2/4514
10	STIKES IBNU SINA	2 Okt 2025	535/STISA/S2.7/G/X/2025	000.4.7.2/4508
11	UNIV SAFIN PATI	2 Okt 2025	261/Pks/USP/X/2025	000.4.7.2/4496
12	UIN SAIZU	2 Okt 2025	1451/Un.19/K.LPPM/HM.1/10/2025	000.4.7.2/4501
13	UIN SALATIGA	2 Okt2025	B-0079/Un.29/L1/KS.00.1/10/2025	000.4.7.2/4502
14	UNIKA	2 Okt 2025	00060/H.3/LPPM/10/2025	000.4.7.2/4511
15	UNWIKU	2 Okt 2025	090/UNWIKU/C.06/X/2025	000.4.7.2/4512
16	UNSIQ WONOSOBO	2 Okt 2025	174/PKS/LP3M-UNSIQ/X/2025	000.4.7.2/4509
17	UPGRIS	2 Okt 2025	0145/LPPM-UPGRIS/X/2025	000.4.7.2/4500
18	UNS	18 Sep 2025	199.2/UN27.24/HK.07.00/2023	522.33/3951
19	POLITEKNIK BANJARNEGARA	2 Okt 2025	017/PTB.12/MOA/PP/2025	000.4.7.2/4499
20	UMNU KEBUMEN	2 Okt 2025	31/K-LPPM/UMNU/PKS/X/2025	000.4.7.2/4513
21	STAI TANBIHUL GHOFILIN BANJARNEGARA	2 Okt 2025	090/STAI.TANGHO/PKS/X/2025	000.4.7.2/4507
22	UNPAND	2 Okt 2025	178/UNPAND/KS/X/2025	000.4.7.2/4504
23	UNIVERSITAS PERADABAN (KKN 2026)	2 Okt 2025	792/MoA/LPPM.061042/IX/2025	000.4.7.2/4505
24	POLINES SEMARANG	2 Okt 2025	5773/PL4.4/KS.00.00/2025	000.4.7.2/4498
25	UIN RADEN MAS SA'ID SURAKARTA	2 Okt 2025	B-215/Un.20/KLPPM/HM.02.3/10/2025	000.4.7.2/4506









Tindak lanjut dari **MoU** antara **Gubernur Jawa Tengah** dengan 40 Perguruan Tinggi di Jawa Tengah telah dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** (PKS) dengan **25 Perguruan Tinggi di Jawa Tengah**.

KEMITRAAN VERVAL

BACKLOG KELAYAKAN (RTLH) MELALUI KKN






NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI RUMAH HASIL VERVAL		JUMLAH
		RTLH	RLH	
1	CILACAP	1070	645	1715
2	BANYUMAS	84	27	111
3	PURBALINGGA	19	43	62
4	BANJARNEGARA	196	71	267
5	KEBUMEN	174	164	338
6	PURWOREJO	1038	1668	2706
7	WONOSOBO	516	136	652
8	MAGELANG	1.235	609	1.844
9	BOYOLALI	1.501	719	2.220
10	KLATEN	-	-	-
11	SUKOHARJO	-	-	-
12	WONOGIRI	-	-	-
13	KARANGANYAR	85	182	267
14	SRAGEN	-	-	-
15	GROBOGAN	1	-	1
16	BLORA	922	861	1.783
17	REMBANG	78	2	80
18	PATI	109	36	145
19	KUDUS	765	1.076	1.841
20	JEPARA	7	15	22
21	DEMAK	1.940	2.558	4.498
22	SEMARANG	1.024	655	1.679
23	TEMANGGUNG	1	1	2
24	KENDAL	884	505	1.389
25	BATANG	1.014	1.339	2.353
26	PEKALONGAN	1.234	1.191	2.425
27	PEMALANG	941	500	1.441
28	TEGAL	2	-	2
29	BREBES	-	-	-
30	KOTA MAGELANG	-	-	-
31	KOTA SURAKARTA	-	-	-
32	KOTA SALATIGA	-	-	-
33	KOTA SEMARANG	-	1	1
34	KOTA PEKALONGAN	-	-	-
35	KOTA TEGAL	-	-	-
T O T A L		**14.840**	**13.004**	**27.844**

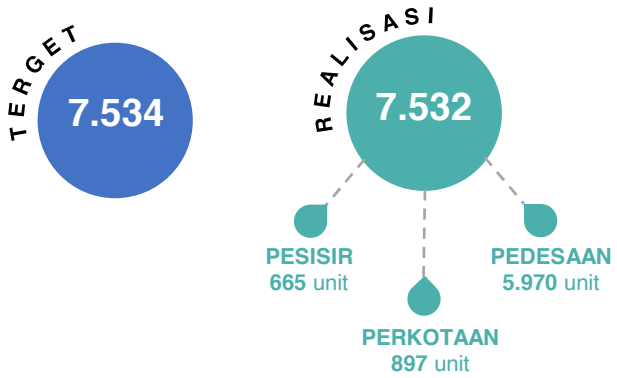
Tindak lanjut dari **Perjanjian Kerja Sama** (PKS) antara **Gubernur Jawa Tengah** dengan 25 Perguruan Tinggi di Jawa Tengah telah dilaksanakan verval melalui kegiatan KKN Tematik.

Data yang diperoleh sebanyak **27.844 BNBA** pada **25 Kabupaten/Kota,** dengan rincian data:

- RTLH sebanyak **14.840 BNBA**
- Rumah yang sudah Layak Huni (RLH) sebanyak **13.004 BNBA**.

ALOKASI DAN REALISASI PENANGANAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

TOTAL JAWA TENGAH



NO	KABUPATEN / KOTA	PB (UNIT)	
		TARGET	REALISASI
PESISIR			
1	Rembang	562	561
2	Jepara	104	104
TOTAL		**666**	**665**

NO	KABUPATEN / KOTA	PB (UNIT)	
		TARGET	REALISASI
PERKOTAAN			
3	Kota Semarang	700	700
4	Kota Salatiga	106	106
5	Kota Surakarta	91	91
TOTAL		**897**	**897**

NO	KABUPATEN / KOTA	PB (UNIT)	
		TARGET	REALISASI
PEDESAAN			
6	Banjarnegara	80	80
7	Banyumas	851	851
8	Blora	264	264
9	Boyolali	187	187
10	Brebes	20	20
11	Cilacap	563	563
12	Demak	96	96
13	Grobogan	303	303
14	Karangayar	60	59
15	Kebumen	190	190
16	Kendal	150	150
17	Klaten	255	255
18	Magelang	105	105
19	Pati	600	600
20	Purbalingga	120	120
21	Purworwjo	42	42
22	Semarang	348	348
23	Sukoharjo	296	296
24	Sragen	814	814
25	Temanggung	407	407
26	Wonogiri	67	67
27	Wonosobo	153	153
TOTAL		**5.971**	**5.970**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya strategis dari pemerintah dengan pendanaan dari APBN, dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni, aman, sehat, dan sesuai dengan standar teknis bangunan.
Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) BNBA yang mengundurkan diri yaitu 1 (satu) orang di Kabupaten Rembang dan 1 (satu) orang Kabupaten Karangayar.

RELOKASI RUMAH

KORBAN BANJIR/ROB

DESA TIMBULSLOKO, KEC.SAYUNG, KAB.DEMAK



PROFIL 3 BNBA PENERIMA BANTUAN RELOKASI RUMAH

KONDISI AWAL

TOUFIQQUR ROHMAN

Desa Purworejo Kec.Bonang Kab. Demak



ABDUL LATIF

Desa Purworejo Kec. Bonang Kab. Demak



MUSYAFAK

Desa Timbulsloko Kec. Sayung Kab. Demak



KONDISI AKHIR

TOUFIQQUR ROHMAN



ABDUL LATIF



MUSYAFAK



PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN RUMAH APUNG

DESA TIMBULSLOKO, KEC.SAYUNG, KAB.DEMAK





PROFIL 3 BNBA PENERIMA BANTUAN RUMAH APUNG

KONDISI AWAL

MUSLIM




ROMANI




MULYONO




KONDISI AKHIR

MUSLIM



ROMANI



MULYONO



PEMBANGUNAN BARU
RELOKASI AKIBAT BENCANA
DESA ARIBAYA, KECAMATAN PAGETAN, KABUPATEN BANJAR NEGARA



Sejak tahun 2020 secara berulang telah terjadi longsor di Dusun Bawang, akibatnya merusak infrastruktur jalan dan lahan permukiman, mengganggu aktivitas sehari-hari warga dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menyiapkan lahan relokasi yang merupakan Tanah Bengkok Kadus 1 Blok 09 RT.05 RW.02, Desa Aribaya, Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan 36 Unit Bantuan Stimulan untuk Pembangunan Baru Relokasi pada Tahun Anggaran 2025.

PENANGANAN PB RELOKASI



KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%

02








Penyediaan

RUMAH SUBSIDI

REALISASI FASILITAS LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)

Sampai dengan Akhir Tahun tahun 2025 sudah terdapat **realisasi FLPP** di **33 Kabupaten/ Kota** sebanyak **22.157 Unit Rumah** dengan Nilai **Rp. 2.641.479.097.221**

Realisasi FLPP paling tinggi di Kabupaten Kendal sebanyak 4.385 Unit senilai Rp.525.718.757.245,00 dan paling rendah di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 60 Unit senilai Rp. 7.118.650.500,00

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Nilai FLPP
		Unit	Rp
1	KAB KENDAL	4.385	525.718.757.245
2	KAB DEMAK	2.148	257.374.117.492
3	KAB BREBES	1.735	207.247.148.249
5	KAB BATANG	1.621	193.539.932.247
4	KAB SEMARANG	1.575	188.203.233.000
6	KAB KARANGANYAR	1.387	165.201.348.150
7	KAB SUKOHARJO	1.248	148.207.289.698
8	KAB PEKALONGAN	937	111.386.164.499
9	KAB SRAGEN	863	102.075.210.750
10	KAB BOYOLALI	706	84.045.414.750
11	KAB TEGAL	647	76.824.838.176
12	KAB PEMALANG	626	74.057.235.000
13	KAB JEPARA	509	60.975.355.494
14	KAB BANYUMAS	439	51.998.103.000
15	KAB MAGELANG	379	45.055.230.000
16	KAB PATI	355	42.357.727.500
17	KAB CILACAP	338	40.241.685.000
18	KAB GROBOGAN	264	31.326.839.999
19	KAB WONOGIRI	238	28.141.942.499
20	KAB PURBALINGGA	194	22.943.532.000
21	KAB REMBANG	187	22.176.584.999
22	KAB WONOSOBO	184	21.535.080.000
23	KAB PURWOREJO	158	18.813.285.000
24	KOTA PEKALONGAN	154	18.149.580.000
25	KAB BLORA	151	17.803.095.000
27	KAB KUDUS	140	16.676.595.000
26	KAB TEMANGGUNG	135	15.884.647.500
28	KOTA SEMARANG	103	12.280.278.975
29	KAB KLATEN	93	11.017.529.999
30	KOTA SALATIGA	67	7.955.415.000
31	KAB KEBUMEN	66	7.511.770.500
33	KOTA TEGAL	65	7.635.480.000
32	KAB BANJARNEGARA	60	7.118.650.500
34	KOTA SURAKARTA	-	-
35	KOTA MAGELANG	-	-
Jumlah		**22.157**	**2.641.479.097.221**

Sumber :
Realisasi FLPP dari www.tapera.go.id/realisasi diakses tanggal 15 Desember 2025.

SEBARAN REALISASI
BANK PENYALUR FLPP

No	Kabupaten/Kota	BANK PENYALUR							
		BANK BTN		BTN SYARIAH		BANK BRI		BANK MANDIRI	
		Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	KAB KENDAL	2.016	241.785.617.250	1.323	158.467.852.500	602	72.307.721.250	91	10.859.519.995
2	KAB DEMAK	1.220	146.084.160.000	518	62.083.305.000	235	28.245.870.000	149	17.847.202.492
3	KAB BREBES	430	51.333.864.000	195	23.326.890.000	978	116.963.460.000	40	4.729.559.249
5	KAB BATANG	489	58.481.807.250	505	60.031.455.000	365	43.747.717.500	86	10.254.524.997
4	KAB SEMARANG	700	83.645.541.750	420	50.053.991.250	348	41.702.715.000	36	4.294.200.000
6	KAB KARANGANYAR	571	68.032.891.050	544	64.721.550.000	49	5.843.837.100	123	14.640.660.000
7	KAB SUKOHARJO	438	52.059.509.250	445	52.861.050.000	211	25.119.816.000	104	12.275.934.448
8	KAB PEKALONGAN	436	51.991.699.500	254	29.895.915.000	140	16.727.985.000	31	3.671.099.999
9	KAB SRAGEN	244	28.915.013.250	431	50.944.350.000	53	6.342.855.000	55	6.429.322.500
10	KAB BOYOLALI	304	36.062.604.750	270	32.257.485.000	40	4.753.245.000	38	4.518.810.000
11	KAB TEGAL	255	30.068.998.176	124	14.769.150.000	232	27.721.755.000	10	1.184.895.000
12	KAB PEMALANG	328	38.768.520.000	55	6.493.035.000	164	19.453.110.000	16	1.853.940.000
13	KAB JEPARA	201	24.035.760.000	145	17.402.535.000	68	8.177.335.500	68	8.165.999.994
14	KAB BANYUMAS	176	20.953.443.000	123	14.487.810.000	81	9.651.945.000	14	1.642.185.000
15	KAB MAGELANG	175	20.885.876.250	133	15.756.768.750	22	2.639.040.000	15	1.793.280.000
16	KAB PATI	149	17.811.161.250	30	3.600.000.000	136	16.286.238.750	28	3.266.070.000
17	KAB CILACAP	177	21.076.545.000	68	8.061.360.000	59	7.090.770.000	10	1.137.645.000
18	KAB GROBOGAN	70	8.292.150.000	11	1.312.530.000	123	14.689.605.000	44	5.114.024.999
19	KAB WONOGIRI	65	7.689.360.000	8	953.580.000	24	2.845.365.000	77	9.061.162.499
20	KAB PURBALINGGA	60	7.121.790.000	54	6.371.652.000	25	2.929.500.000	20	2.388.675.000
21	KAB REMBANG	130	15.409.260.000	10	1.194.540.000	29	3.429.975.000	9	1.078.334.999
22	KAB WONOSOBO	81	9.476.175.000	37	4.292.250.000	20	2.340.600.000	29	3.452.625.000
23	KAB PURWOREJO	133	15.810.735.000	4	481.020.000	5	600.000.000	9	1.080.000.000
24	KOTA PEKALONGAN	22	2.552.790.000	77	9.026.595.000	43	5.128.920.000	5	601.275.000
25	KAB BLORA	99	11.665.920.000	-	-	42	4.989.660.000	4	473.505.000
27	KAB KUDUS	27	3.204.345.000	72	8.564.640.000	33	3.968.160.000	4	458.940.000
26	KAB TEMANGGUNG	44	5.209.395.000	25	2.933.370.000	4	468.930.000	32	3.726.577.500
28	KOTA SEMARANG	46	5.475.975.000	29	3.468.645.000	5	601.275.000	21	2.501.628.975
29	KAB KLATEN	65	7.698.885.000	2	225.000.000	13	1.540.230.000	8	954.119.999
30	KOTA SALATIGA	16	1.917.285.000	21	2.523.060.000	26	3.081.255.000	1	73.050.000
31	KAB KEBUMEN	51	5.760.505.500	-	-	-	-	3	349.500.000
33	KOTA TEGAL	12	1.403.730.000	6	709.650.000	37	4.359.705.000	1	118.275.000
32	KAB BANJARNEGARA	14	1.669.515.000	3	360.255.000	5	600.505.500	35	4.128.375.000
34	KOTA SURAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KOTA MAGELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	**9.244**	**1.102.350.827.226**	**5.942**	**707.631.289.500**	**4.217**	**504.349.101.600**	**1.216**	**144.124.917.645**

Sumber :
Realisasi FLPP dari www.tapera.go.id/realisasi diakses tanggal 15 Desember 2025

SEBARAN REALISASI
BANK PENYALUR FLPP

No	Kabupaten/Kota	BANK PENYALUR									
		BPD JAWA TENGAH		BANK SYARIAH INDONESIA		BPD JATENG SYARIAH		BANK BNI		BPD JAWA BARAT DAN BANTEN	
		Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	KAB KENDAL	135	16.171.023.750	1	120.255.000	18	2.159.302.500	46	5.531.340.000	109	13.029.240.000
2	KAB DEMAK	20	2.394.030.000	-	-	-	-	2	238.530.000	-	-
3	KAB BREBES	23	2.711.640.000	38	4.475.595.000	2	219.000.000	7	841.785.000	2	240.510.000
5	KAB BATANG	21	2.490.240.000	64	7.601.512.500	7	841.785.000	6	711.000.000	-	-
4	KAB SEMARANG	35	4.196.880.000	-	-	11	1.315.050.000	24	2.874.600.000	1	120.255.000
6	KAB KARANGANYAR	2	240.510.000	1	120.255.000	42	5.040.555.000	13	1.544.565.000	15	1.799.265.000
7	KAB SUKOHARJO	6	721.275.000	16	1.923.570.000	17	1.923.840.000	2	240.510.000	9	1.081.785.000
8	KAB PEKALONGAN	12	1.434.570.000	17	2.043.570.000	-	-	32	3.817.755.000	1	120.000.000
9	KAB SRAGEN	17	1.973.385.000	7	822.000.000	38	4.503.990.000	12	1.423.530.000	6	720.765.000
10	KAB BOYOLALI	1	120.255.000	3	357.750.000	35	4.177.800.000	8	956.700.000	7	840.765.000
11	KAB TEGAL	11	1.321.020.000	8	946.770.000	5	600.000.000	1	93.750.000	1	118.500.000
12	KAB PEMALANG	4	480.000.000	47	5.594.415.000	-	-	1	118.275.000	11	1.295.940.000
13	KAB JEPARA	20	2.353.215.000	2	240.510.000	-	-	5	600.000.000	-	-
14	KAB BANYUMAS	23	2.629.680.000	1	117.255.000	3	355.785.000	18	2.160.000.000	-	-
15	KAB MAGELANG	10	1.197.000.000	6	641.760.000	-	-	15	1.781.505.000	-	-
16	KAB PATI	11	1.274.257.500	-	-	-	-	1	120.000.000	-	-
17	KAB CILACAP	7	841.785.000	-	-	2	240.510.000	15	1.793.070.000	-	-
18	KAB GROBOGAN	14	1.680.000.000	-	-	-	-	2	238.530.000	-	-
19	KAB WONOGIRI	4	443.280.000	1	120.000.000	21	2.478.750.000	34	4.069.425.000	-	-
20	KAB PURBALINGGA	10	1.152.150.000	-	-	3	350.760.000	22	2.629.005.000	-	-
21	KAB REMBANG	2	236.550.000	-	-	5	591.375.000	2	236.550.000	-	-
22	KAB WONOSOBO	6	720.255.000	-	-	-	-	11	1.253.175.000	-	-
23	KAB PURWOREJO	3	360.765.000	1	120.255.000	-	-	3	360.510.000	-	-
24	KOTA PEKALONGAN	6	720.000.000	-	-	1	120.000.000	-	-	-	-
25	KAB BLORA	5	553.755.000	-	-	-	-	1	120.255.000	-	-
27	KAB KUDUS	2	240.000.000	2	240.510.000	-	-	-	-	-	-
26	KAB TEMANGGUNG	25	2.978.985.000	2	240.510.000	-	-	3	326.880.000	-	-
28	KOTA SEMARANG	-	-	1	120.255.000	-	-	1	112.500.000	-	-
29	KAB KLATEN	1	118.275.000	-	-	1	120.255.000	3	360.765.000	-	-
30	KOTA SALATIGA	3	360.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KAB KEBUMEN	8	922.755.000	-	-	1	120.000.000	3	359.010.000	-	-
33	KOTA TEGAL	3	354.825.000	6	689.295.000	-	-	-	-	-	-
32	KAB BANJARNEGARA	1	120.000.000	-	-	2	240.000.000	-	-	-	-
34	KOTA SURAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KOTA MAGELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	**451**	**53.513.126.250**	**224**	**26.536.042.500**	**214**	**25.398.757.500**	**293**	**34.913.520.000**	**162**	**19.367.025.000**

Sumber :
Realisasi FLPP dari www.tapera.go.id/realisasi diakses tanggal 15 Akhir 2025

SEBARAN REALISASI
BANK PENYALUR FLPP

No	Kabupaten/Kota	BANK PENYALUR									
		BANK DKI		BANK DKI SYARIAH		BJB SYARIAH		BPD YOGYA		BANK MEGA SYARIAH	
		Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP	Jumlah	Nilai FLPP
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	KAB KENDAL	-	-	43	5.166.630.000	-	-	-	-	1	120.255.000
2	KAB DEMAK	-	-	4	481.020.000	-	-	-	-	-	-
3	KAB BREBES	-	-	-	-	18	2.164.590.000	-	-	2	240.255.000
5	KAB BATANG	66	7.936.830.000	12	1.443.060.000	-	-	-	-	-	-
4	KAB SEMARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB KARANGANYAR	21	2.525.355.000	6	691.905.000	-	-	-	-	-	-
7	KAB SUKOHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB PEKALONGAN	11	1.322.805.000	3	360.765.000	-	-	-	-	-	-
9	KAB SRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB BOYOLALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KAB TEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KAB PEMALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KAB JEPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KAB BANYUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KAB MAGELANG	-	-	-	-	-	-	3	360.000.000	-	-
16	KAB PATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KAB CILACAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KAB GROBOGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KAB WONOGIRI	4	481.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KAB PURBALINGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KAB REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KAB WONOSOBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KAB PURWOREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KOTA PEKALONGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KAB BLORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KAB KUDUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KAB TEMANGGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KOTA SEMARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KAB KLATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KOTA SALATIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KAB KEBUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KOTA TEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KAB BANJARNEGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KOTA SURAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KOTA MAGELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	**102**	**12.266.010.000**	**68**	**8.143.380.000**	**18**	**2.164.590.000**	**3**	**360.000.000**	**3**	**360.510.000**

Sumber :
Realisasi FLPP dari www.tapera.go.id/realisasi diakses tanggal 15 Desember 2025

SEBARAN REALISASI
PELAKSANAAN PAJAK BPHTB 0%

No.	Kab / Kota	MBR Penerima Pembebasan BPHTB	Keterangan
1	KAB BANJARNEGARA	38	a. Kabupaten Purbalingga, menetapkan dalam Peraturan Bupati bahwa syarat luas bangunan maksimal yang bisa mendapatkan pembebasan adalah 30 m^2. Hal ini menyebabkan tidak adanya masyarakat yang memenuhi kriteria mengingat luas bangunan rata-rata rumah subsidi adalah 36 m^2; b. Kabupaten Rembang, menetapkan dalam Peraturan Bupati bahwa salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi adalah adanya fotokopi Kartu PKH. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya pengajuan pembebasan BPHTB dari Masyarakat; c. Kabupaten Blora, sampai saat ini baru ada 4 pengajuan pembebasan BPHTB dari masyarakat, dan semua permohonan tersebut ditolak dengan alasan 2 pemohon ber-KTP luar Blora dan 2 pemohon melalukan pembelian secara tunai.
2	KAB BANYUMAS	246	
3	KAB BATANG	859	
4	KAB BLORA	0	
5	KAB BOYOLALI	381	
6	KAB BREBES	975	
7	KAB CILACAP	34	
8	KAB DEMAK	218	
9	KAB GROBOGAN	237	
10	KAB JEPARA	199	
11	KAB KARANGANYAR	1.065	
12	KAB KEBUMEN	1	
13	KAB KENDAL	1.871	
14	KAB KLATEN	68	
15	KAB KUDUS	94	
16	KAB MAGELANG	37	
17	KAB PATI	99	
18	KAB PEKALONGAN	325	
19	KAB PEMALANG	304	
20	KAB PURBALINGGA	0	
21	KAB PURWOREJO	95	
22	KAB REMBANG	0	
23	KAB SEMARANG	150	
24	KAB SRAGEN	386	
25	KAB SUKOHARJO	753	
26	KAB TEGAL	268	
27	KAB TEMANGGUNG	51	
28	KAB WONOGIRI	117	
29	KAB WONOSOBO	9	
30	KOTA MAGELANG	*23 (Program Pemerintah)*	
31	KOTA PEKALONGAN	42	
32	KOTA SALATIGA	12	
33	KOTA SEMARANG	66	
34	KOTA TEGAL	38	
35	KOTA SURAKARTA	*4 (Program Pemerintah)*	
T O T A L		**9.048**	

Sumber :
Data BPHTB dari kabupaten/ kota

SOSIALISASI RUMAH SUBSIDI
TELAH DILAKSANAKAN DI JAWA TENGAH

Pelaksanaan Sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kabupaten/Kota bersama Bank Jateng jumlah total peserta 14.686 orang. Sosialisasi diperuntukkan bagi ASN (PNS, Guru, nakes dan PPPK) di lingkungan pemerintah daerah, HRD Swasta, Karyawan Swasta dan Ojol. Sosialisasi telah dilaksanakan dikantor **Disperakim Provinsi Jawa Tengah, 22 Kabupaten dan 6 Kota**.













No	Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta
1	Kota Semarang	624
2	Kab.Kendal	475
3	Kab. Banyumas	707
4	Kab. Sragen	500
5	Kab. Blora	190
6	Kab. Boyolali	380
7	Kota Pekalongan	225
8	Kab. Grobogan	6.554 (luring 789; daring 5.767)
9	Kab. Purworejo	444
10	Kab. Temanggung	350
11	Kab.Tegal	220
12	Kab. Batang	80
13	Kab. Klaten	200
14	Kota Salatiga	152
15	Kab. Pati	115
16	Kab. Pekalongan	100
17	Kab. Wonogiri	100
18	Kota Magelang	360
19	Disperakim Prov.	250
20	Kab. Magelang	60
21	Kab. Demak	500
22	Kab. Wonosobo	200
23	Kota Tegal	300
24	Kota Surakarta	300
25	Cilacap	300
26	Kab. Sukoharjo	250
27	Kab. Brebes	300
28	Kab. Kebumen	250
29	Kab. Kudus	200
JUMLAH		**14.686**

PAMERAN DAN SOSIALISASI PERUMAHAN 2025





JATENG OMAH EXPO 2025

15 - 26 Mei 2025 Semarang

Peserta

- **24 Pengembang Perumahan**
  - Lokasi perumahan : **42 lokasi**
  - Rumah yang dipasarkan : **3.338 unit** (2.078 unit subsidi & 1.260 unit komersil)
- **6 Perbankan** (BRI, Bank Jateng, BTN, BSI, BNI, dan BPR BKK Jateng)
- **2 Building Material**

Total Transaksi JOMEX-3 2025
96 unit rumah senilai **Rp. 27.769.970.000,00** terdiri dari :

- 74 unit rumah subsidi senilai Rp. 12.707.360.000,-
- 22 unit rumah komersil senilai Rp. 15.062.610.000,-

PAMERAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH ke-80

20-22 Agustus 2025
di Kantor Gubernur
Jawa Tengah





Peserta :

- 24 Pengembang
- Total selama tiga hari pameran mencapai 40.032 orang. Diikuti 24 pengembang di Jawa Tengah.





JATENG FAIR 2025

27 Juni – 6 Juli 2025, Semarang

Bertempat di Kawasan PRPP Semarang, Stan Disperakim didukung oleh 11 pengembang perumahan dan dikunjungi sebanyak 352 orang. Sosialisasi program Disperakim yaitu : Optimis, Dukungan Fasilitasi PSN, Edukasi tentang rumah sederhana sehat, Lomba hari habitat, Bareng bareng bangun omah sekeng, Tuku omah sak lemah e dan Aplikasi: si-kaper, simperum, alosistapkp, sikunang tanah, beranda ngumah.

PAMERAN PRODUK INOVASI (PPI)

26 – 28 September 2025, Blora





Lapangan Kridosono Blora Lokasi pameran PPI 2025. Dalam rangka sosialisasi hasil-hasil iptek dan inovasi kepada masyarakat luas, baik inovasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi maupun BUMN/BUMD/Perusahaan. Total 265 orang jumlah kunjungan dengan substansi yang paling mendapatkan animo yaitu RUSPIN, informasi rumah subsidi dan komersial.



PAMERAN PROPERTI SOLO RAYA REI PROPERTY EXPO 3

30 Mei – 8 Juni 2025, Surakarta

Pameran berlokasi di Solo Paragon Pameran REI Property Expo 3 . Pameran properti REI Property Expo 3 diikuti oleh 18 pengembang perumahan yang menyediakan rumah subsidi dan komersil serta melibatkan sektor perbankan sebanyak 5 bank.

Sumber : Solosae.com

DEMAK PAMERAN PERUMAHAN 2025

24 – 28 Oktober 2025, Demak



Mendukung Visi 3 Juta Rumah dan slogan Buka Pintu, Miliki Rumahmu adalah tema pameran perumahan berlokasi di Sport Centre Demak. Sebanyak 16 pengembang perumahan, 4 perbankan (BRI, Bank Jateng, BKK Jateng, dan BTN), serta dua perusahaan pendukung yakni PT Nusantara Building Industries (NBI) dan Semen Grobogan.



Sumber : Solopos.com

PAMERAN PROPERTI BOYOLALI EXPO

25 Agustus 2025, Boyolali

Acara yang mengusung tema “Semua Bisa Punya Rumah” ini berlangsung di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali. Acara Pobox tersebut mengundang perwakilan 30 perusahaan swasta, dan 14 perusahaan perumahan.

PAMERAN PERUMAHAN KENDAL

12 – 14 Oktober 2025, Kendal

Dalam rangka Percepatan Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Pameran Perumahan dengan tema “**Temukan Hunianmu Disini**” yang dilaksanakan di Halaman Rusunawa Kebondalem Kendal. Partisipasi pameran tersebut yaitu Bank Jateng Cabang Kendal, 4 asosiasi perumahan HIMPERRA, REI, APERNAS, APERSI, serta 16 pengembang perumahan di Kabupaten Kendal.





Sumber : @adinataraya_smg

SOSIALISASI
KUR PERUMAHAN DAN FLPP





Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (**FLPP**) di Jawa Tengah :

No	Kabupaten/ Kota	Tanggal	Lokasi
1	Kota Semarang	5 November 20205	MAC Ballroom
2	Kota Salatiga	5 November 2025	Kampus UKSW
3	Kudus	6 November 2025	GOR Djarum
4	Demak	7 November 2025	Perumahan Griya Nusa Asri
5	Banyumas	8 November 2025	Auditorium Graha Widyatama Unsoed

Peserta acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Kota Semarang 1.000 orang, terdiri dari:

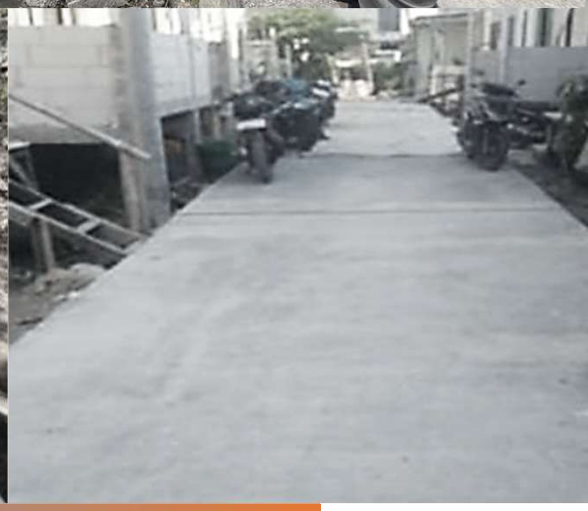
a. 5 Bupati Walikota beserta Dinas Perkim dan Dinkop dan UKM (Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Grobogan)
b. OPD Provinsi Jawa TengahTerkait
c. Perbankan
d. Pengembang Perumahan beserta anggota dan mitra kerja
e. UMKM



03





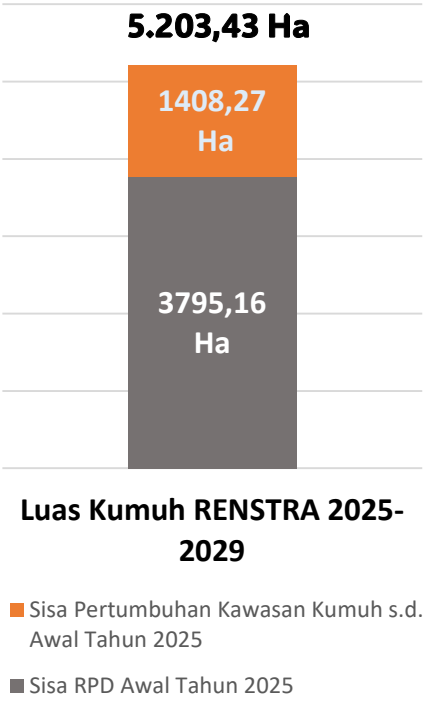


Penanganan

KAWASAN PERMUKIMAN

URAIAN	LUASAN (Ha)
SISA RPD (Awal Tahun 2025)	3.795,16
SISA PERTUMBUHAN KAWASAN KUMUH S.D AWAL TAHUN 2025	1.408,27
LUASAN KAWASAN KUMUH AWAL TAHUN 2025 (RENSTRA 2025-2029)	**5.203,43**

Pada awal tahun 2025 terdapat sisa **3.795,16 Ha** dari baseline RPD. Namun, kawasan permukiman kumuh terus berkembang, sampai dengan tahun 2025 terdapat sisa pertumbuhan **1.408,27 Ha** sehingga luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah menjadi **5.203,43 Ha.**



SEBARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SESUAI KEWENANGAN AWAL TAHUN 2025

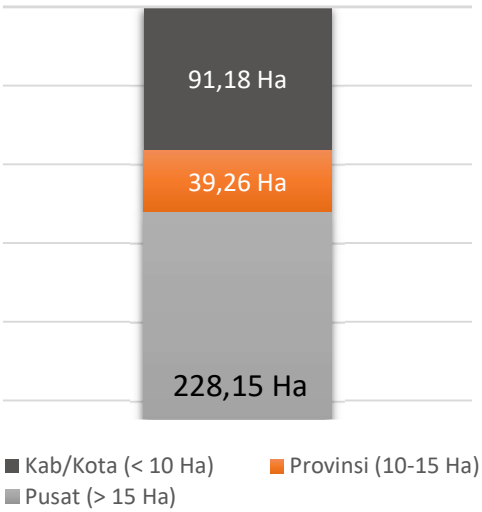
No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)			Total
		Kab/Kota (<10 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Pusat (>15 Ha)	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	18,86	10,14	39,18	68,18
11	Kab. Sukoharjo	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	0,00	40,46	68,42	108,88
22	Kab. Semarang	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	52,73	10,32	33,10	96,15
25	Kab. Batang	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemalang	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	25,89	0,00	0,00	25,89
33	Kota Semarang	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	0,00	0,00	37,80	37,80
Jumlah		**1.609,84**	**805,40**	**2.788,19**	**5.203,43**

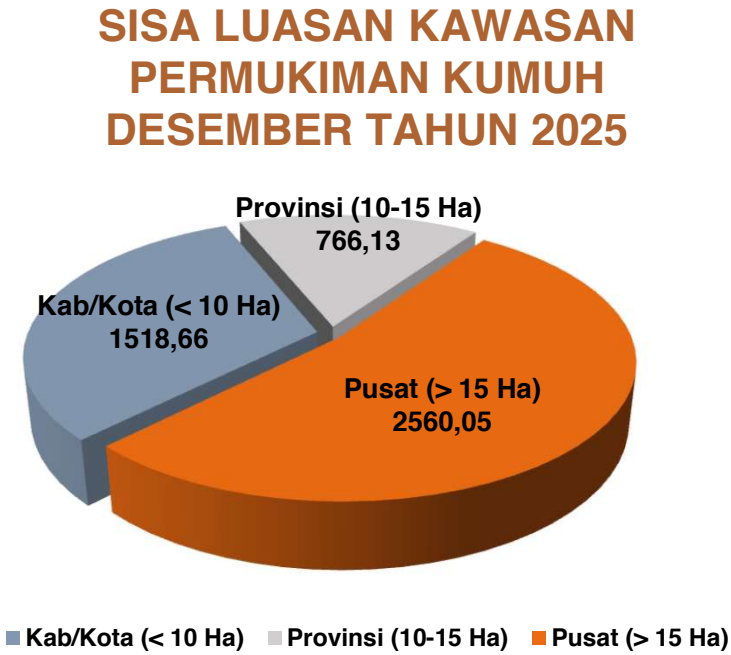
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025

Kewenangan Penanganan	Luasan Kawasan Kumuh Awal Tahun 2025	Penanganan Kawasan Kumuh s.d. Desember Tahun 2025	Sisa Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2025
Kab/Kota (< 10 Ha)	1609,84	91,18	1518,66
Provinsi (10-15 Ha)	805,40	39,26	766,13
Pusat (> 15 Ha)	2788,19	228,15	2560,05
Jumlah Total	**5203,43**	**358,59**	**4844,84**





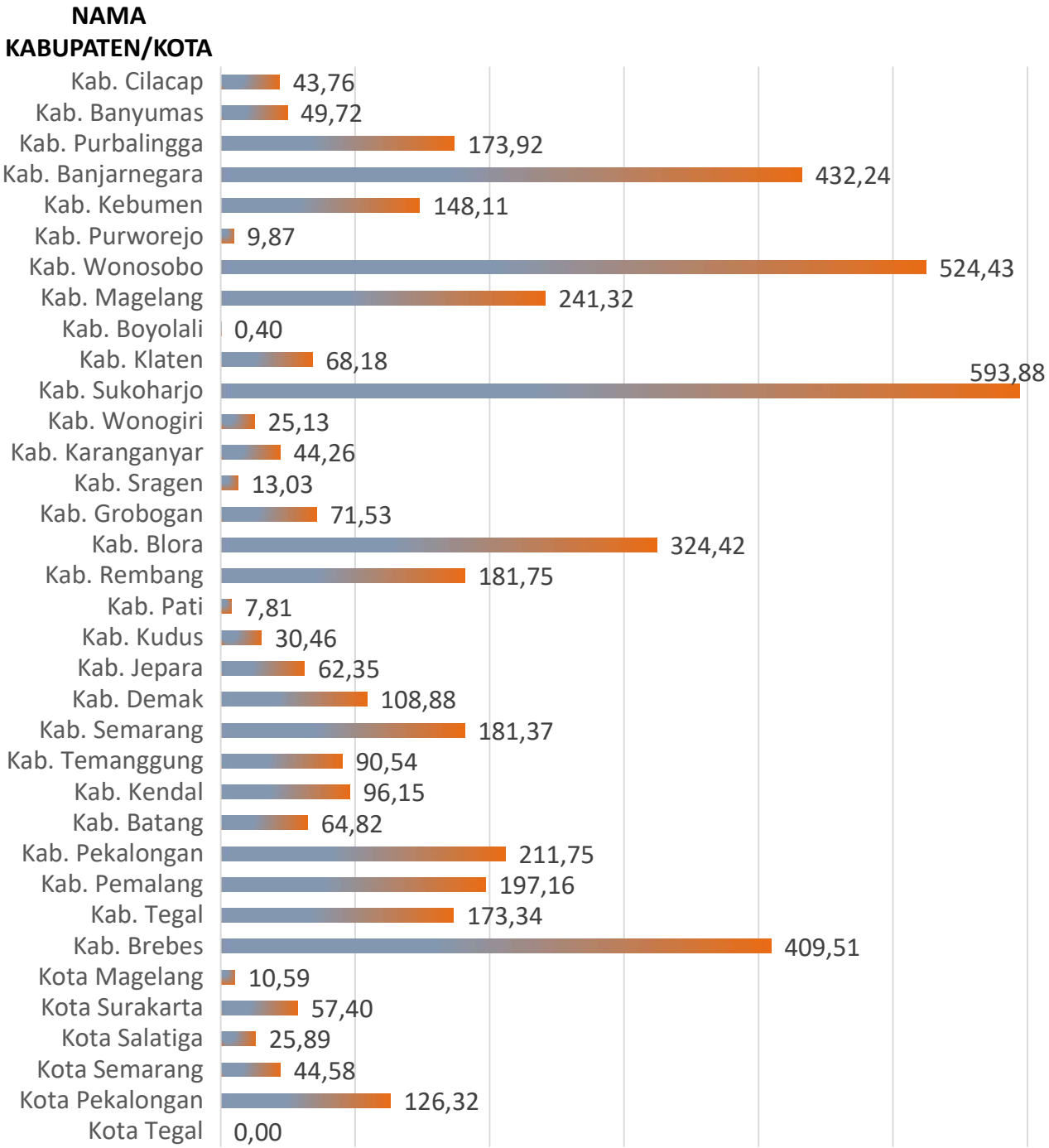




SEBARAN SISA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
SESUAI KEWENANGAN

No	Kabupaten/Kota	Luasan Awal Tahun 2025			Total	Penanganan s.d. Desember Tahun 2025			Total	Sisa Desember Tahun 2025			Total
		Kab/Kota (<10 Ha)	Prov (10-15 Ha)	Pusat (>15 Ha)		Kab/Kota (<10 Ha)	Prov (10-15 Ha)	Pusat (>15 Ha)		Kab/Kota (<10 Ha)	Prov (10-15 Ha)	Pusat (>15 Ha)	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	43,76	**43,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	43,76	**43,76**
2	Kab. Banyumas	16,87	8,34	26,37	**51,58**	0,00	1,86	0,00	**1,86**	16,87	6,48	26,37	**49,72**
3	Kab. Purbalingga	56,70	45,31	163,33	**265,34**	28,32	10,22	52,88	**91,42**	28,38	35,09	110,45	**173,92**
4	Kab. Banjarnegara	77,99	83,70	270,55	**432,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,99	83,70	270,55	**432,24**
5	Kab. Kebumen	99,20	52,14	0,00	**151,34**	1,27	1,96	0,00	**3,23**	97,94	50,17	0,00	**148,11**
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	**9,87**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,27	5,60	0,00	**9,87**
7	Kab. Wonosobo	54,54	96,85	444,69	**596,08**	8,34	6,01	57,30	**71,65**	46,20	90,84	387,39	**524,43**
8	Kab. Magelang	113,40	74,66	53,26	**241,32**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	113,40	74,66	53,26	**241,32**
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	**31,72**	0,00	0,00	31,32	**31,32**	0,00	0,00	0,40	**0,40**
10	Kab. Klaten	18,86	10,14	39,18	**68,18**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,86	10,14	39,18	**68,18**
11	Kab. Sukoharjo	443,64	51,63	113,07	**608,35**	14,47	0,00	0,00	**14,47**	429,17	51,63	113,07	**593,88**
12	Kab. Wonogiri	0,00	16,73	31,73	**48,46**	0,00	5,40	17,93	**23,33**	0,00	11,33	13,80	**25,13**
13	Kab. Karanganyar	57,91	10,25	12,84	**81,00**	30,40	0,00	6,34	**36,74**	27,51	10,25	6,50	**44,26**
14	Kab. Sragen	6,75	0,00	6,28	**13,03**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,75	0,00	6,28	**13,03**
15	Kab. Grobogan	30,63	0,00	68,06	**98,69**	6,73	0,00	20,43	**27,16**	23,90	0,00	47,63	**71,53**
16	Kab. Blora	35,78	12,16	276,48	**324,42**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,78	12,16	276,48	**324,42**
17	Kab. Rembang	36,19	54,04	91,53	**181,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,19	54,04	91,53	**181,75**
18	Kab. Pati	0,80	19,99	4,15	**24,94**	0,80	12,18	4,15	**17,13**	0,00	7,81	0,00	**7,81**
19	Kab. Kudus	6,50	0,00	23,96	**30,46**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	0,00	23,96	**30,46**
20	Kab. Jepara	41,60	0,00	20,75	**62,35**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,60	0,00	20,75	**62,35**
21	Kab. Demak	0,00	40,46	68,42	**108,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	40,46	68,42	**108,88**
22	Kab. Semarang	40,91	10,17	130,30	**181,37**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,91	10,17	130,30	**181,37**
23	Kab. Temanggung	3,67	20,81	66,06	**90,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,67	20,81	66,06	**90,54**
24	Kab. Kendal	52,73	10,32	33,10	**96,15**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,73	10,32	33,10	**96,15**
25	Kab. Batang	5,53	10,75	48,54	**64,82**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,53	10,75	48,54	**64,82**
26	Kab. Pekalongan	19,28	21,79	172,30	**213,38**	0,00	1,63	0,00	**1,63**	19,28	20,17	172,30	**211,75**
27	Kab. Pemalang	0,00	10,81	186,35	**197,16**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	10,81	186,35	**197,16**
28	Kab. Tegal	32,16	36,82	105,20	**174,19**	0,85	0,00	0,00	**0,85**	31,31	36,82	105,20	**173,34**
29	Kab. Brebes	258,12	69,18	82,21	**409,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	258,12	69,18	82,21	**409,51**
30	Kota Magelang	5,63	4,96	0,00	**10,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,63	4,96	0,00	**10,59**
31	Kota Surakarta	28,73	0,00	28,67	**57,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,73	0,00	28,67	**57,40**
32	Kota Salatiga	25,89	0,00	0,00	**25,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,89	0,00	0,00	**25,89**
33	Kota Semarang	12,36	15,13	17,09	**44,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,36	15,13	17,09	**44,58**
34	Kota Pekalongan	23,21	12,66	90,45	**126,32**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,21	12,66	90,45	**126,32**
35	Kota Tegal	0,00	0,00	37,80	**37,80**	0,00	0,00	37,80	**37,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Jumlah		**1.609,84**	**805,40**	**2.788,19**	**5.203,43**	***91,18***	***39,26***	***228,15***	***358,59***	**1.518,66**	**766,13**	**2.560,05**	**4.844,84**

GRAFIK SISA LUASAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH



SEBARAN SERAH TERIMA PSU PERUMAHAN

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PERUMAHAN	PERUMAHAN SUDAH SERAH TERIMA PSU	PERUMAHAN BELUM SERAH TERIMA PSU
1	Kab. Cilacap	60	54	6
2	Kab. Banyumas	355	143	212
3	Kab. Purbalingga	128	77	51
4	Kab. Banjarnegara	81	34	47
5	Kab. Kebumen	46	9	37
6	Kab. Purworejo	256	37	219
7	Kab. Wonosobo	54	28	26
8	Kab. Magelang	165	1	164
9	Kab. Boyolali	258	60	198
10	Kab. Klaten	56	21	35
11	Kab. Sukoharjo	525	239	286
12	Kab. Wonogiri	**47**	33	14
13	Kab. Karanganyar	399	264	135
14	Kab. Sragen	229	54	175
15	Kab. Grobogan	75	47	28
16	Kab. Blora	56	8	48
17	Kab. Rembang	37	14	23
18	Kab. Pati	100	39	61
19	Kab. Kudus	46	28	18
20	Kab. Jepara	86	30	56
21	Kab. Demak	119	107	12
22	Kab. Semarang	157	92	65
23	Kab. Temanggung	60	56	4
24	Kab. Kendal	325	80	245
25	Kab. Batang	249	102	147
26	Kab. Pekalongan	159	78	81
27	Kab. Pemalang	106	37	69
28	Kab. Tegal	176	69	107
29	Kab. Brebes	112	63	49
30	Kota Magelang	32	22	10
31	Kota Surakarta	6	6	0
32	Kota Salatiga	97	72	25
33	Kota Semarang	400	101	299
34	Kota Pekalongan	92	59	33
35	Kota Tegal	64	44	20
	J u m l a h	**5213**	**2208**	**3005**

Terdapat **5.213 perumahan** di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 35 Kabupaten/Kota di awal tahun 2025. Pada Desember 2025, sebanyak **2.208 perumahan** (42,36 %) telah melakukan **serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**. Sedangkan **3.005 perumahan** (57,64 %) belum melaksanakan serah terima PSU.

Sumber :
Kompilasi Data dari Kabupaten/Kota

Kondisi Serah Terima PSU



PELAKSANAAN HIBAH
PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU)

HIBAH PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR TA. 2025

Lokasi : Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar
Pekerjaan : Drainase lingkungan dan jalan lingkungan



Kondisi Awal



Kondisi Akhir



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

PELAKSANAAN FISIK
PENGHARGAAN HARI HABITAT TAHUN 2025

JUARA 1 - KABUPATEN PEKALONGAN

Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Sarana

Lokasi : Desa Rowoyoso, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan

1. Pekerjaan drainase, jalan beton dan sumur resapan



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

2. Pekerjaan drainase, jalan beton dan sumur resapan



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

PELAKSANAAN FISIK
PENGHARGAAN HARI HABITAT TAHUN 2025

JUARA 2 - KABUPATEN BANYUMAS

Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana
Lokasi : Kel. Sumampir, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas

1. Pekerjaan drainase dan jalan beton

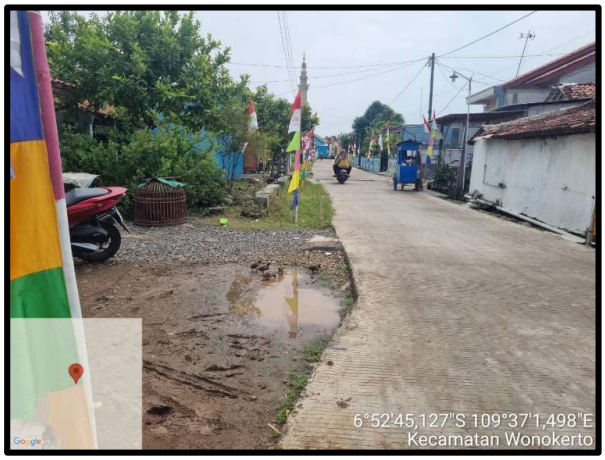


Kondisi Awal



Kondisi Akhir

2. Pekerjaan drainase



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

PELAKSANAAN FISIK

PENGHARGAAN HARI HABITAT TAHUN 2025

JUARA 3 - KABUPATEN KEBUMEN

Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana
Lokasi : Desa Prembun, Kec. Prembun, Kab. Kebumen

1. Pekerjaan jalan aspal



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

2. Pekerjaan jalan aspal



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

04











Program

PERTANAHAN

DATA REALISASI LUAS PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 proses penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a. **Perencanaan Pengadaan Tanah** = Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah;

b. **Persiapan Pengadaan Tanah** = Pembentukan Tim Persiapan yang bertugas melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan *(Tahapan yang dilaksanakan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah);*

c. **Pelaksanaan Pengadaan Tanah** = Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; Penilaian Ganti Kerugian; Musyawarah penetapan Ganti Kerugian; Pemberian Ganti Kerugian; dan Pelepasan tanah instansi;

d. **Penyerahan hasil** = Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan.

PENETAPAN LOKASI DI JAWA TENGAH

PENETAPAN LOKASI OLEH GUBERNUR



No	Penetapan Lokasi	Kabupaten /Kota	Jumlah Bidang	Luas Tanah (Ha)	Nomor dan Tanggal Terbit SK
1	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah	Kab.Temanggung	Tidak ada jumlah bidang dan luas karena perpanjangan, datanya sudah terdata di Penlok Tahun 2022		100.3.3.1/53 Tahun 2025 Tanggal 17 Februari 2025 (Jl. Tol Yogyakarta - Bawen)
		Kota Magelang			
		Kab.Magelang			
		Kab. Semarang			
2	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar	Kab. Karangayar	± 1.080	± 23,70	100.3.3.1/58 Tahun 2025 18 Februari 2025 (Jaringan Irigasi D.I, Jlantah)
3	Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I	Kota Semarang	± 65	± 39,226	100.3.3.1/191 Tahun 2025 7 Juli 2025
4	Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I	Kab. Demak	± 69	± 13,42	100.3.3.1/191 Tahun 2025 7 Juli 2025
5	SK Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I	Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Karanganyar	± 80	± 3,04	100.3.3.1/355 Tahun 2025 3 September 2025
6	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Bufferzone di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. KPI RU IV Cilacap	Kab. Cilacap	± 215	± 5,47	100.3.3.1/406 Tahun 2025 22 Oktober 2025
	T O T A L		**± 1.359**	**± 77,197**	

PENETAPAN LOKASI DIDELEGASIKAN KE BUPATI / WALIKOTA



No	Penetapan Lokasi	Kabupaten /Kota	Jumlah Bidang	Luas Tanah (Ha)	Nomor dan Tanggal Terbit SK
1	Penelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SUTT 150 kV Pati - Pati II / Trangkil Kab. Pati Kepada Bupati Pati	Kab. Pati	± 23	± 0,490	100.3.3.1/114 Tahun 2025 21 April 2025
2	Penelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SUTET 500 kV Rawalo/Kesugihan Incomer (PLTU Adipala-PLTU Cilacap) di Kabupaten Cilacap Kepada Bupati Cilacap	Kab. Cilacap	± 115	± 4,249	100.3.3.1/126 Tahun 2025 2 Mei 2025
3	Pembangunan Embung Blisuk, Karanggedang, Kawungcarang	Kab. Cilacap	± 39	± 3,934	SK. Nomor 100.3.3.1/245 Tahun 2025, 29 Juli 2025
4	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat	Kab. Pemalang	1	± 9,480	100.3.3.1/425 Tahun 2025 Tanggal 15 November 2025
	T O T A L		**± 178**	**± 18,154**	

REALISASI PERMASALAHAN PERTANAHAN
LINTAS KABUPATEN / KOTA DI PROV. JATENG

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pemohon	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Kabupaten Demak	2025	M. Sukron Suroso	Bidang Tanah Nomor 22 yang menjadi Obyek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak tidak ditetapkan sebagai penerima Dana Kerohiman.	Telah difasilitasi dengan hasil yang dituangkan di Berita Acara yang menjelaskan bahwa aduan Sukron Suroso tidak dapat diterima sehingga bidang tanah yang menjadi obyek aduan ditetapkan sebagai tanah negara.	Bidang Tanah Nomor 22 ditetapkan sebagai Tanah Negara dan tidak diberikan Dana Kerohiman.
2	Kabupaten Klaten	2025	Drs. Husni Thamrin, dkk	Aduan Keberatan Perubahan Trase di Tol Solo Jogja Lokasi Desa Manjungan.	Dalam proses fasilitasi dan identifikasi permasalahan pertanahan tersebut.	
3	Kabupaten Kudus	2025	Ani. S	Aduan Ani. S terhadap adanya dugaan penyerobotan dari mafia tanah di Kabupaten Kudus.	Telah difasilitasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya permasalahan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.	
4	Kabupaten Pekalongan	2025	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Permohonan Fasilitasi PDSK Tanah Musnah Pemerintah Kabupaten Pekalongan..	Telah diterbitkan Surat Kep. Gubernur Jateng No.100.3.3.1/424 Th. 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Bendung Gerak Untuk Penanganan Banjir Rob di Kab. Pekalongan Kepada Bupati Pekalongan pada tanggal 12 Nov 2025.	Telah difasilitasi dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara.

REALISASI PERMASALAHAN PERTANAHAN
LINTAS KABUPATEN / KOTA DI PROV. JATENG

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pemohon	Permasalahan	Kondisi Saat ini	Keterangan
5	Kab. Kendal	2025	Agus Surono & Associates	Adanya kekhawatiran terjadinya penurunan Harga Tanah karena terdapat rencana pembangunan SUTT 150Kv KEK Kendal	• Telah dilaksanakan rapat fasilitasi dengan Pemilik Tanah bersama Kantah Kabupaten Kendal, PT. PLN (Persero) • Telah dituangkan dalam berita Acara bahwa Pemilik Tanah yang bidang tanahnya menjadi Obyek pembangunan SUTT 150Kv KEK Kendal Incomer telah setuju dan mendukung adanya . .	Telah difasilitasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil telah diberi penjelasan dan Agus Surono, dkk telah menerima adanya pembangunan SUTT.
6	Kabupaten Pemalang	2025	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kab. Pemalang dengan hasil dari pencermatan DPPT Sekolah Rakyat di Kab. Pemalang masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian dalam penyusunan DPPT Sekolah Rakyat di Kab. Pemalang.	Telah difasilitasi yang hasilnya telah ditindaklanjuti melalui surat kepada Bupati Pemalang yang intinya pendelegasian kewenangan tahap persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Pemalang.	Tahapan pengadaan tanah hingga penerbitan penetapan lokasi dilaksanakan secara mutatis mutandis sesuai dengan tahapan pengadaan tanah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH LP2B

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

PROV. JATENG





No	Kabupaten/ Kota	Lokasi (Desa, Kec, Kab)	Jumlah Bidang Tanah	Keterangan
1	Kab. Cilacap	Desa Binangun dan Desa Jepara Wetan, Kecamatan Jati	80	Pembayaran PNBP sudah terlaksana, proses sertifikasi saat ini pada tahapan pengumuman selama 30 hari
2	Kab. Wonosobo	Desa Sawangan Kecamatan Leksono	80	Pembayaran PNBP sudah terlaksana, proses sertifikasi saat ini pada tahapan pengumuman selama 30 hari
3	Kab. Blora	Desa Botoreco Kecamatan Kunduran	80	Pembayaran PNBP sudah terlaksana, proses sertifikasi saat ini pada tahapan pengumuman selama 30 hari
Jumlah			**240**	

Pelaksanaan kegiatan ini untuk mendorong percepatan sertifikasi hak atas tanah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepemilikan tanah kepada masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penataan aset Reforma Agraria agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

REFORMA AGRARIA

KEGIATAN PELATIHAN





Pada tahun 2025 Pelaksanaan Akses Reforma Agraria (RA) di Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Brebes, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal dan Kab. Semarang, Kota Tegal dan Kota Semarang.

.

No	Lokasi	Kebutuhan Akses	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Instansi Yang Terlibat	Keterangan
1	Desa Kesambi Kec.Mejobo Kab. Kudus	Pembuatan Pupuk Organik Skala Rumah Tangga	Pelatihan	50	▪ Kantor Pertanahan Kab Kudus ▪ DPUTR Kab Kudus ▪ Praktisi	Sudah terlaksana
2	Desa Mandisari Kec. Parakan Kab. Temanggung	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Guna Menunjang Kesejahteraan dan Ketahana Pangan Masyarakat	Pelatihan	50	▪ Disperakim Prov Jateng ▪ PerkimLH Kab Temang-gung ▪ Praktisi	Sudah terlaksana
3	Desa Sawangan Kec.Banyuroto Kab.Magelang	Pelatihan Jaminan Pangan Masyarakat "Jampangmas" Guna Terwujudnya Ketahanan Pangan	Pelatihan	50	• DPUTR Kab Magelang • Praktisi	Sudah terlaksana
4	Desa Tegalgandu Kec.Wanasari Kab. Brebes	Pelatihan Jaminan Pangan Masyarakat "Jampangmas" Guna Terwujudnya Ketahanan Pangan	Pelatihan	50	• Disperkim Kab Brebes • Praktisi	Sudah terlaksana
5	Desa Jeruksari Kec. Tirto Kab Pekalongan	Pembuatan Bioaktivator dari Limbah Rumah Tangga	Pelatihan	50	• - Kantor Pertanahan Kab Pekalongan • - Praktisi	Sudah terlaksana
6	Desa Pakis Kec. Limbangan Kab. Kendal	Pemanfaatan Sampah Ruah Tangga Menjadi Produk Organik	Pelatihan	50	• Kantor Pertanahan Kab Kendal • Praktisi	Sudah terlaksana
7	Desa Lereb Kec. Ungaran Selatan Kab. Semarang	Edukasi Paska Panen dan Ketrampilan Pengolahan Kopi	Pelatihan	50	• Kantor Pertanahan Kab Semarnag • Praktisi	Sudah terlaksana

DATA REALISASI PELATIHAN
UNTUK MENDUKUNG REFORMA AGRARIA







No	Lokasi	Kebutuhan Akses	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Instansi Yang Terlibat	Keterangan
8	Desa Margadana Kec. Margadana Kota Tegal	Pemanfaatan Sampah Ruah Tangga Menjadi Produk Organik yang bernilai Jual	Pelatihan	50	▪ DPUTR Kota Tegal ▪ Praktisi	Sudah terlaksana
9	Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang	Strategi Efektif Mengembangkan Usaha Di Era Digital	Pelatihan	50	▪ DPUTR Kota Semarang ▪ Praktisi	Sudah terlaksana
10	Desa Kebondowo Kec.Banyubiru Kab.Semarang	Strategi Efektif Mengembangkan Usaha Di Era Digital	Pelatihan	50	• DPUTR Kab Semarang • Praktisi	Sudah terlaksana

Pelaksanaan RA berupa pelatihan kepada penerima manfaat fasilitasi sertifikasi LP2B dan PTSL tahun sebelumnya, sebanyak masing-masing 50 KK. Total pelaksanaan reforma agrarian dalam bentuk pelatihan sebanyak 500 KK.

DATA TIM GTRA KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kabupaten/ Kota	SK Tim GTRA Kab / Kota	
		Tanggal	Nomor
1	Kab. Banjarnegara	12 Akhir Tahun 2023	6601/1464 Tahun 2023
2	Kab. Batang	12 Akhir Tahun 2023	141/475/2023
3	Kab. Brebes	19 June 2024	590 / 2656 Tahun 2024
4	Kab. Cilacap	03 August 2024	592/189/19/Tahun 2024
5	Kab. Demak	21 Akhir Tahun 2023	590/427 Tahun 2023
6	Kab. Jepara	27 December 2023	590/311 Tahun 2023
7	Kab. Kendal	05 February 2024	590/136/2024
8	Kab. Kudus	02 January 2024	500.17.1/32/2024 Tahun 2024
9	Kab. Pati	28 March 2024	050/1795 Tahun 2024
10	Kab. Sukoharjo	04 January 2024	500.17/242 Tahun 2024
11	Kab. Tegal	18 October 2023	600.2/752 Tahun 2023
12	Kab. Temanggung	02 May 2024	590/34 Tahun 2024
13	Kab. Wonogiri	04 May 2024	590/120/HK/2024
14	Kab. Wonosobo	14 May 2024	500.17.1/147/2024
15	Kota Magelang	30 July 2024	590/091/112 Tahun 2024
16	Kota Semarang	29 May 2024	500.17/469 Tahun 2024
17	Kota Tegal	03 April 2024	600/024.2/2024
18	Kab. Semarang	24 October 2023	500.17.1/0483/2023
19	Kab. Banyumas	09 September 2020	050/780 Tahun 2020
20	Kab. Blora	09 September 2020	140.1/1708/2019
21	Kab. Boyolali	30 October 2019	590/743/2019
22	Kab. Grobogan	30 August 2019	590/573/2019
23	Kab. Kebumen	26 Akhir Tahun 2019	590/2064 Tahun 2019
24	Kab. Klaten	30 March 2023	590/123 Tahun 2023
25	Kab. Karanganyar	17 January 2020	592/258 Tahun 2020
26	Kab. Pekalongan	16 December 2019	592/953 Tahun 2019
27	Kab. Pemalang	10 January 2019	188.4/978/2019
28	Kab. Purbalingga	20 December 2019	590/360 Tahun 2019
29	Kab. Purworejo	08 January 2019	160.18/420/2019
30	Kab. Rembang	01 February 2023	591/0093/2023
31	Kab. Sragen	03 July 2024	500,17,1/448/01,3/2024
32	Kab. Magelang	14 June 2021	180.182/187/KEP/01.01/2021
33	Kota Salatiga	02 Akhir Tahun 2022	590-05/47/2022
34	Kota Surakarta	12 April 2019	590/340 Tahun 2019
35	Kota Pekalongan	01 May 2022	200/0015 Tahun 2022

PENGHARGAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Provinsi Peringkat I Terbaik Dalam Melaksanakan Program Penyediaan Perumahan

Penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dengan pengalokasian anggaran bidang perumahan total 17.510 unit rumah.

Innovation Public Service

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pembangunan Rumah Layak Huni

Penghargaan dari TV One





Pengharagaan Badan Publik Informatif

Anugerah KIP Award 2025

Dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Badan Publik Informatif.

PENUTUP



PERMASALAHAN

a. Kompleksnya data yang dikumpulkan dan dikompilasi dari sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang berasal dari kabuapten/ kota;

b. Adanya dinamika pertumbuhan data sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dan memaksimalkan proses validasi data setiap saat.

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

a. Meningkatkan koordinasi secara intens dengan kabupaten/ kota sampai dengan level desa/ kelurahan dan dilakukan desk setiap triwulan;

b. Melakukan kompilasi data dengan memisahkan antara data yang sesuai kondisi awal tahun dan perkembangan data dari semua sektor perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;

c. Melaksanakan Program KKN Tematik yang berkolaborasi dengan beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam melakukan review data-data perumahan sampai dengan level desa;

d. Monitoring dan evaluasi progress pelaksanaan rumah subsidi bersama pemerintah kabupaten dan developer perumahan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

disperakimjtg
disperakimprovjateng
@disperakimjateng4822